**PERTIMBANGAN PENYIDIK MENGHENTIKAN PROSES HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU**

Oleh : David Binsar Ari Mangasi

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, SH., MH.

Pembimbing 2 : Ferawati, SH., MH.

Alamat : Jl.Lobak, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan

Email : dbs89@yahoo.com - Telepon : 082169274747

ABSTRACT

Structuring or changes to the rules on the highway is absolute considering the current rules of Traffic and Road Transport has been deemed incompatible with the development and needs of society as set forth in the consideration of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport. Cases that often experience pros and cons in the field of law is a case related to negligence. The neglect is usually done by most people ie in the case of traffic accidents, the accident until the death of the victim. A frequent form of violation in traffic on the highway is a traffic accident. For example, running beyond the specified speed limit then tire broke that resulted in the vehicle having an accident.

Based on the description above, the authors are interested to examine the problem with the title: "Consideration of Investigators Stopping Legal Process Against Traffickers Traffic Accidents That Cause Others Died At Pekanbaru City Police". As for the formulation of the problem of the title is, first, how the process of solving the crime of traffic accidents that resulted in other people died in Pekanbaru Town Police Department? Secondly, what is the basis of consideration of the investigator to stop the legal process against the perpetrators of traffic accident at Pekanbaru Town Police Station?

This type of research is empirical research, another term used is sociological legal research also called field research. This sociological law research is based on primary data. Primary data / basic data is data that can be directly from the community as the first source through through field research.

Based on the results of the study authors concluded that The criminal acts of traffic accidents which resulted in the death of another person are common offenses which can not be stopped by legal process and result from negligence resulting in loss of life of others. The process of settling the criminal acts of traffic accidents which resulted in the death of others at Pekanbaru City Police Force in certain cases which have sufficient evidence to be solved through the judicial system. While for cases that have lack of evidence or cases due to negligence of victims, resolved through non-penal path that is by using the principle of ADR (Alternative Disupute Resolution)

The basis of consideration in deciding the suspension of investigation on traffic accidents cases in the jurisdiction of Pekanbaru City Police Station based on two things namely based on juridical and non-juridical provisions.

Keywords: *Investigation, Criminal, Traffic Accident.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penataan atau perubahan terhadap aturan di jalan raya mutlak dilakukan mengingat aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kasus yang sering mengalami pro dan kontra di bidang hukum adalah kasus yang berkaitan dengan kealpaan. Kealpaan yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yakni dalam kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tersebut sampai mengakibatkan korban meninggal dunia.¹ Sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 359 yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Menurut hukum dalam suatu kecelakaan lalu lintas diperlukan pertanggungjawaban pidana dari pelaku karena pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika

sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.²

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan lalu lintas. Misalnya, berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.³

Karena itu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:⁴

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung

---

² Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1987, hlm. 52.

³ http://www.?title=Kecelakaan_lalulintas&action=edit&section=1, diakses tanggal 21 Februari 2017.

⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

---

¹ Bayu Adi Wicaksana, Pertimbangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang Di Kabupaten Klaten, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Volume I Issue I, Surakarta, Juni 2016, hlm. 95.

jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi;
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, operasional, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (23) tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia.”⁵

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan “ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas

yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.”

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka institusi yang mempunyai kewenangan pertama dalam melakukan proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah, Kepolisian, yaitu dengan melakukan olah di tempat kejadian perkara dan dapat melanjutkan pada tahap penyidikan guna menentukan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggar hukum tetapi juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, jo Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang bunyi pasalnya adalah, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta

---

⁵ Jamal Abdullah, *Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang Diselesaikan Dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor I, Pekanbaru, Februari 2016, hlm. 2.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.⁶

Di wilayah hukum Kota Pekanbaru terdapat beberapa kasus mengenai penghentian penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Penghentian penyidikan diatur dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2). Di dalam pasal tersebut, terdapat suatu penjelasan bahwa penyidikan dapat dihentikan oleh penyidik dengan melihat beberapa pertimbangan yaitu, dalam proses penyidikan yang dilakukan tidak terdapat bukti yang cukup kuat, dan penyidik merasa bahwa peristiwa yang terjadi bukan termasuk ke dalam suatu bentuk tindak pidana serta penyidikan dihentikan demi hukum.

Kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru pada tahun 2015 tercatat telah terjadi 227 kasus Laka Lantas, dan tahun 2016 tercatat telah terjadi 212 kejadian Laka Lantas yang berada di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, dan dengan jumlah keseluruhan pelaku Laka Lantas sebanyak 547 orang. Laka Lantas tersebut terdiri dari kecelakaan tunggal hingga kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul: **“Pertimbangan Penyidik Menghentikan Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain**

Meninggal Dunia Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dalam ilmu hukumnya baik secara umum ataupun khusus yang dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat.
- b) Sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana

---

⁶ Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi*, Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm. 211.

Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.

- c) Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum dan penegak hukum tentang permasalahan yang diteliti.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidik dan Penyidikan

Penyidik menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁷

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah

penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.⁸

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 106, dan Pasal 108 KUHAP).⁹

2. Teori Tindak Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHAP maupun undang-undang di luar

---

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 110.

---

⁸ *Ibid.*, hlm. 101.

⁹ *Ibid.*, hlm. 53.

KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.¹⁰

Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Jika terjadi perbuatan melanggar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, maka sanksinya adalah pemecatan dari jabatan, sedangkan dalam lapangan hukum perdata biasanya adalah ganti kerugian. Dalam lapangan hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.¹¹

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹²

Pasal 1359 KUHP disebutkan bahwa, “karena salahnya menyebabkan matinya orang lain. Mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya pelaku tersebut.

Pasal 360 Ayat (1) KUHP karena salahnya menyebabkan orang luka berat. Disini luka berat mempunyai artian suatu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, dan Ayat (2) menjelaskan karena salahnya menyebabkan orang luka sedemikian rupa, yang dimaksud luka ringan adalah luka atau sakit bagaimana besarnya dan dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut.¹³

3. Konsep Restorative Justice

Polisi adalah gerbang dari sistem peradilan pidana, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa. Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif,

---

¹⁰ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 26 Juni 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹¹ Erdianto Effendi, Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No.II, Pekanbaru, Februari-Juli 2014, hlm. 232.

---

¹² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm.66.

¹³ *Ibid.*, hlm. 198.

dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana.

Kepolisian pada praktiknya seringkali juga menggunakan cara-cara yang dianggap di luar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi, walaupun hal tersebut tidak terdata dalam suatu dokumen resmi. Kemungkinan terjadinya sebuah “penyimpangan” ini telah disadari oleh para ahli. Menurut Romli Atmasasmita “di negara demokrasi tampak bahwa aparat kepolisian selalu dihadapkan pada dua konflik kepentingan yaitu kepentingan memelihara ketertiban di satu sisi dan kepentingan mempertahankan asas legalitas di sisi lain”¹⁴. Penyimpangan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak korban, sebisa mungkin hingga kembali seperti keadaan sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Hal tersebut dikenal dengan istilah konsep *restorative justice*

Perlu diketahui bahwa sebenarnya *restorative justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang

pada dasarnya bertujuan untuk *restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis.¹⁶ Yang dimaksud penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan, Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan oleh penulis.

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifa-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷ Maka sifat

---

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Putra Abardin, 2000, hlm 5.

---

¹⁵ Mudzakir, *Analisis Restorative Justice : Sejarah, Ruang Lingkup, Dan Penerapannya*, Jakarta, 2013.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

¹⁷ *Ibid.*

penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, karena menggambarkan permasalahan hukum dalam pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Tahun 2015 dan 2016.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulisan karena setiap tahunnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia khususnya di Kota Pekanbaru semakin meningkat

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸

Adapun populasi yang penulis pilih dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Unit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 2) Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 3) Pelaku kecelakaan lalu lintas

---

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 297.

4) Pihak korban kecelakaan lalu lintas.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi penelitian yang dipilih sebagai wakil representatif dari keseluruhan untuk diteliti. Sampel penelitian yang akan diambil menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹⁹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan pengumpulan data kelapangan yang dipergunakan bersama-sama dengan metode lain. Seperti, melalui wawancara langsung dengan responden serta menggunakan kuisisioner²⁰ yang telah disiapkan sebelumnya terhadap pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

---

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 181.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

c. Data Tertier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, dan seterusnya.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab langsung kepada responden dilapangan.²² Responden dalam wawancara ini adalah Kepala Unit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Penyidik Unit Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b. Kuisioner

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawaban. Maka responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai

dengan selernya, yang mana dalam hal ini respondennya adalah pihak korban.

c. Kajian Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu sebagai sumber data sekunder.²³ Landasan ini yang mendukung proposal skripsi ini, penulis mempelajari buku-buku, literatur, catatan kuliah yang ada hubungannya dengan proposal skripsi ini.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun data sekunder, penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti.

II. PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada dasarnya diselesaikan dengan cara penal (melalui persidangan) dengan mengacu kepada Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Namun untuk beberapa kasus termasuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

²² Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 63.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 113.

korban, pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan penyelesaian perkara melalui jalur non-penal (perdamaian), terutama pada kasus yang kurang alat buktinya. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia termasuk dalam kecelakaan lalu lintas berat sesuai dengan Pasal 229 ayat 1 (c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dapat kita lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel II.1
Bentuk Penyelesaian Perkara
Kecelakaan Lalu Lintas di
Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tahun	Jumlah Lak a	Penyelesaian Perkara				
		P21	SP3	AD R	Sidik	Lidik
2015	227	7	53	107	27	33
2016	212	6	41	96	47	22

Sumber: Data Olahan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam hal pihak kepolisian menyelesaikan kasus/perkara melalui jalur non-penal, dikenal dengan istilah diskresi. Dalam Sistem Peradilan Pidana, diskresi bukanlah hal yang asing lagi. Tindakan diskresi dari dahulu sudah banyak dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi porsi dan bentuk tindakannya

berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Laka Polresta Pekanbaru, Bapak IPTU Hendri²⁴, diskresi adalah tindakan penyidik menurut penilaiannya untuk menentukan suatu perkara lanjut ke pengadilan atau diselesaikan secara kekeluargaan.

Tabel II.2
Data Usia Pelaku Pelanggaran
Lalu Lintas Yang Menimbulkan
Kecelakaan Berakibat Kematian
di Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru Tahun 2015 dan
Tahun 2016

Usia (tahun)	2015	2016	Jumlah	Persentase
<17	65	58	123	28%
18-20	70	74	144	33%
21-30	39	21	60	13,5%
>30	53	59	112	25,5%
Jumlah	227	212	439	100%

Sumber: Data Olahan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Tabel di atas menunjukkan usia pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian. Pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian paling banyak dilakukan pada umur 18-20 tahun yakni 144 orang pelaku. Pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja yaitu yang telah berumur 21-30 tahun tetapi juga terjadi pada usia muda yakni usia <17 tahun, hal ini disebabkan pengemudi belum siap mental, terutama pada pengendara

²⁴ Wawancara dengan Bapak IPTU Hendri selaku Kanit Laka Polresta Pekanbaru pada tanggal 20 November 2017

sepeda motor. Pengendara tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

B. Dasar Pertimbangan Penyidik Menghentikan Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian baik harta maupun nyawa. Kerugian terjadi tidak hanya kerugian yang dialami korban, melainkan pelaku juga mengalaminya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polresta Pekanbaru dengan mewawancarai IPTU Hendri sebagai Kepala Unit Lalu Lintas di Polresta Pekanbaru²⁵ bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang di hentikan melalui perdamaian tetap dalam status SP3. Dikarenakan setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik bahwa pelaku tidak bersalah, namun pelaku melakukan perdamaian agar tidak terjadi konflik dengan keluarga korban.

Penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polresta Pekanbaru memiliki dasar pertimbangan baik

secara yuridis maupun secara non yuridis. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah:

1. Penghentian Penyidikan Berdasarkan Ketentuan Yuridis

a. Menggunakan kewenangan Diskresi Berdasarkan Pasal 18 Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dengan penyidik BRIPKA Nanda Saputra, beliau mengatakan bahwa untuk menghentikan proses hukum yang tidak disebutkan didalam Pasal 109 Ayat 2 KUHAP penyidik menggunakan kewenangan diskresi.²⁶

Ditambahkan oleh AIPTU Andray alasan penyidik menggunakan kewenangan diskresi adalah :

- 1) Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
- 2) Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.

---

²⁵ Wawancara dengan Bapak IPTU Hendri selaku Kaniit Laka Polresta Pekanbaru pada tanggal 20 November 2017

---

²⁶ Wawancara dengan Briпка Nanda Saputra selaku penyidik Unit Laka Polresta Pekanbaru pada tanggal 20 November 2017

- 3) Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak keluarga korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang
  - 4) Pelaku dan keluarga korban telah melakukan upaya perdamaian
  - 5) Kewenangan diskresi dapat memberikan kepuasan dan keadilan bagi pelaku dan keluarga korban
- b. Berdasarkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR)
- Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mewawancarai Kanit Lantas di Polresta Pekanbaru IPTU Hendri peran polisi pada penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polresta Pekanbaru yaitu dengan melakukan mediasi antara keluarga korban dan pelaku yang dimediasi oleh polisi. Lanjut IPTU Hendri bahwa tidak ada aturan yang khusus menyatakan bahwa polisi berperan menjadi mediator dalam menyelesaikan tindak pidana di kepolisian tetapi berpedoman pada surat Kapolri Nomor B/3002/XII/2009 tentang penanganan kasus melalui ADR, surat kapolri ini bersifat tertutup dan hanya berlaku bagi intern polisi.
- Selanjutnya BRIGPOL Harry Syatiawan menyatakan

bahwa Peraturan Kapolri tersebut ditindak lanjuti oleh Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolusion* (ADR), maka peran polisi dalam menyelesaikan tindak pidana di kepolisian yaitu :

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum / adat serta memenuhi azas keadilan
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk

mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

2. Berdasarkan Ketentuan Non Yuridis

- a. Karena adanya perdamaian yang dilakukan antara pelaku dengan keluarga korban

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPDA Dodi Sahputra pada hari selasa tanggal 21 November 2017 di Unit Laka Polresta Pekanbaru, menjelaskan bahwa perdamaian dapat menjadi dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, karena perdamaian dianggap oleh pelaku dan keluarga korban mencerminkan keadilan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak

- b. Karena kelalaian korban

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada AIPDA Dodi Sahputra, beliau menyatakan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku

tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di lakukan karena kelalaian terjadi bukan karena pelaku, melainkan karena korban yang tidak mematuhi rambu lalu lintas, hal tersebut dibuktikan dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di TKP dan mendengarkan keterangan saksi saksi.

Dalam tugas-tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan maka tindakan Diskresi Kepolisian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Artinya berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam system hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasaan- kebiasaan.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; Artinya tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam

lingkungan jabatannya; dan menghormati HAM.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia merupakan delik biasa yang dimana tidak bisa dihentikan proses hukumnya dan terjadi akibat kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada kasus-kasus tertentu yang memiliki alat bukti yang cukup diselesaikan melalui jalur peradilan. Sementara untuk kasus yang memiliki kekurangan alat bukti ataupun kasus yang dikarenakan kelalaian korban, diselesaikan lewat jalur non penal yakni dengan menggunakan prinsip ADR (*Alternative Dispute Resolution*)
2. Dasar pertimbangan dalam memutuskan penghentian penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang didasarkan pada dua hal yakni berdasarkan ketentuan yuridis dan ketentuan non yuridis.

B. Saran

1. Agar pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru khususnya Satuan Kecelakaan Lalu Lintas hendaknya mematuhi undang-undang yang berlaku dalam penyelesaian kasus kecelakaan

lalu lintas terkhusus dalam hal korban meninggal dunia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 235 ayat (1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Agar masyarakat terutama pihak keluarga korban yang terlibat dalam kasus Laka Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia untuk mengawasi jalannya proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Banjary, Syaefurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi*, Restu Agung, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Putra Abardin.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative Justice : Sejarah, Ruang Lingkup, Dan Penerapannya*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudjite, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta..

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Bayu Adi Wicaksana, Pertimbangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang Di Kabupaten Klaten, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Volume I Issue I, Surakarta, Juni 2016

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal West Law*

Erdianto Effendi, Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No.II, Pekanbaru, Februari-Juli 2014

Jamal Abdullah, Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang

Diselesaikan Dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian), *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor I, Pekanbaru, Februari 2016, hlm. 2.

Widia Edorita, Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, 1 Agustus 2010, hlm 115.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

D. Website

[http://www.?title=Kecelakaan_lalulintas&action=edit&section=1,](http://www.?title=Kecelakaan_lalulintas&action=edit&section=1)